

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan didasarkan pada hubungan kontraktual di antara anggota di perusahaan di mana direktur dan agen adalah pemain utama. Prinsipal adalah pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak didalamnya sedangkan agen adalah penerima hak prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen wajib bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan oleh prinsipal. Penerapan teori keagenan dapat dilakukan dalam kontrak kerja yaitu menentukan proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan mempertimbangkan manfaat keseluruhan. Kontrak kerja adalah seperangkat aturan untuk mekanisme bagi hasil itu dalam bentuk keuntungan, pengembalian dan risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Kontrak kerja akan optimal jika kontrak tersebut adil, yaitu mampu menyeimbangkan secara matematis antara prinsipal dan agen. Bukti pemenuhan kewajiban yang optimal oleh agen dengan pengiriman insentif/imbalance khusus yang memuaskan dari prinsipal ke agen. Sifat *agency theory* adalah merancang kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen jika terjadi konflik, selain itu prinsipal dan agen juga sama-sama menghindari adanya risiko (Astria, 2011).

Pemisahan kepemilikan dan manajemen disebutkan dalam literatur akuntansi dalam teori keagenan. Teori ini adalah salah satu teori yang muncul dalam pengembangan penelitian akuntansi, yang merupakan modifikasi dari pengembangan lebih lanjut model akuntansi keuangan dengan penambahan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Teori keagenan didasarkan pada hubungan kontraktual antara pemegang saham/pemilik dan manajemen/manajer. Menurut teori ini hubungan antara pemilik dan manajer secara *inheren* sulit dibangun karena adanya benturan kepentingan. Konflik dan tarik ulur antara prinsipal dan agen yang dapat menyebabkan masalah yang dikenal dengan *Asymmetric Information* (AI), yaitu informasi yang tidak seimbang karena distribusi informasi yang tidak merata antara prinsipal dan agen. Ketergantungan

pada pihak eksternal untuk angka akuntansi, membuat manajer mencari cara demi keuntungan mereka sendiri dengan AI yang tinggi, menciptakan keinginan yang kuat pada manajer dalam memanipulasi pekerjaan untuk kepentingan pribadi. Konflik keagenan muncul antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda, serta dapat mempersulit dan menghambat perusahaan untuk mencapai kinerja positif guna menciptakan nilai baik bagi perusahaan maupun pemegang saham (Putra, 2012).

Dengan adanya hal ini, informasi keuangan banyak digunakan dalam praktik pelaporan menyebabkan kurangnya transparansi yang dapat menyebabkan konflik antara prinsipal dan agen. Akibat dari perilaku manajemen yang tidak transparan dalam penyajian informasi ini akan menjadi penghambat praktik GCG (*Good Corporate Governance*) dalam perusahaan karena salah satu prinsip dasar GCG adalah transparansi (keterbukaan). Berdasarkan teori agensi ini, perusahaan menyadari perlunya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan perusahaan. Selain untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan penyalahgunaan wewenang manajerial dalam pengelolaan perusahaan dalam menerima keuntungan, juga memberikan citra yang baik bagi perusahaan kepada publik dan calon investor.

2.1.2 Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas tunggal yang hanya bekerja dengan sendirinya, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan (Ghozali & Chariri, 2017). Masalah ini berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan perusahaan yang disediakan oleh para pemangku kepentingannya. Keberadaan perusahaan tidak bisa terlepas dari keberadaan pemangku kepentingan dan dukungan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan umumnya dalam memperhatikan pengungkapan informasi karena kontribusinya terhadap kinerja keuangan (Orlitzky, *et al.*, 2003) dan terhadap nilai perusahaan (Mackey, *et al.*, 2007). Jadi semakin banyak bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan yang selalu diikuti dengan komunikasi yang terbuka dan jujur dapat meningkatkan

hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan dan citra perusahaan tumbuh, semakin besar loyalitas pelanggan, omzet perusahaan akan meningkat, profitabilitas perusahaan akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebagai imbalannya, atas meningkatnya dari nilai perusahaan..

Dalam konteks untuk menjelaskan hubungan antara GCG dan performa keuangan perusahaan, teori pemangku kepentingan harus dilihat dari kedua sisi baik dalam etika (moral) maupun dalam bidang bisnis. Bidang etika menyatakan bahwa semua pihak yang berkepentingan memiliki hak untuk diperlakukan adil dari organisasi, dan manajer harus memimpin organisasi dengan bermanfaat untuk semua yang terlibat (Deegan, 2004). Jika manajer mampu mengelola organisasi secara optimal, terutama dalam upaya penciptaan nilai bagi perusahaan, maka berarti pengelola telah memenuhi aspek etika teori ini. Nilai tambah dalam konteks ini terjadi melalui penggunaan semua potensi yang dimiliki perusahaan, baik karyawannya, aset berwujud dan modal struktural. Pengelolaan yang baik dari semua potensi ini menciptakan nilai tambah untuk perusahaan, yang memberikan kepentingan kepada pihak yang berkepentingan. Bidang utama teori pemangku kepentingan berpendapat dengan kekuatan ini, pemangku kepentingan untuk mempengaruhi tata kelola perusahaan harus dilihat sebagai fungsi dari tingkat kontrol pemangku kepentingan atas sumber daya tersebut dengan kebutuhan organisasi. Ketika pihak yang berkepentingan mencari kontrol sumber daya organisasi, orientasinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan memanifestasikan pendapatan tinggi yang dihasilkan oleh organisasi (Bontis, *et al.*, 2000). Di dalam konteks ini, pemangku kepentingan memiliki kepentingan untuk mempengaruhi manajemen untuk menggunakan potensi penuh dari organisasi, karena hanya dengan manajemen yang baik dan kepemimpinan yang maksimal dengan segala potensi tersebut, organisasi dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan, yang merupakan orientasi bagi pemangku kepentingan dalam manajemen intervensi (Belkaoui, 2003).

2.1.3 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Menurut Spence (1973) teori sinyal menyatakan bahwa pemilik informasi mengirimkan sinyal kepada pemegang saham dalam bentuk informasi tentang situasi berkaitan bisnis yang menguntungkan bagi pemegang saham. Teori ini

menjelaskan mengenai hal dalam menginformasi pengaruh dalam suatu keputusan investasi. Tinggi atau rendahnya profitabilitas dalam nilai perusahaan penting dalam teori sinyal. Meningkatnya nilai perusahaan sengaja diberikan sebagai harapan kepada pemegang saham sehingga pasar dapat membedakan baik buruknya kualitas suatu perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut yang akan membuat investor tertarik untuk berinvestasi di perusahaan.

Menurut Dvir, dkk (2011), *signaling theory* adalah tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan dengan menawarkan bimbingan kepada investor tentang bagaimana cara memandang prospek perusahaan yang akan datang. Perusahaan dengan prospek yang baik akan berusaha menghindari penjualan saham dan mencari modal baru yang dibutuhkan dengan berbagai cara, termasuk dalam melakukan pengelolaan penggunaan utang (Ulum, 2017). *Signaling theory* mengusulkan seperti apa bentuk sinyal itu dari perusahaan dalam memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Tanda yang diberikan dalam bentuk informasi tentang apa yang telah dilakukan manajemen. Selain itu, tanda tersebut bisa berupa promosi atau informasi dari pemangku kepentingan yang menyatakan bahwa perusahaan lebih baik dari perusahaan lain. Teori sinyal menjelaskan bahwa pensinyalan terjadi oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer dalam penghantaran informasi melalui laporan keuangan dengan menerapkan kebijakan konservatisme akuntansi yang mengarah ke pendapatan kualitas yang lebih tinggi. Prinsip ini menitikberatkan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keuntungan dan membantu pengguna laporan keuangan untuk menyajikan pendapatan dan aset.

Sinyal atau tanda ini mengacu pada informasi perusahaan dalam laporan tahunan. Tujuan perusahaan yang menyediakan informasi laporan tahunan adalah sebagai keterbukaan informasi, dengan adanya asimetri informasi antara pihak internal dan eksternal. Oleh karena itu setiap informasi keuangan atau non-keuangan merupakan salah satu cara perusahaan yang harus diungkapkan melalui pengungkapan laporan keuangan dan laporan keuangan berkelanjutan terhadap lingkungan. Jika perusahaan memiliki manajemen yang baik terutama dalam akuntansi sosial dan lingkungan di dalam laporan tahunan, hal ini

menunjukkan bahwa manajemen memiliki kontrol sosial dan lingkungan yang baik untuk meningkatkan nilai perusahaan. Menurut penjelasan teori sinyal, dapat dikatakan perusahaan yang mengungkapkan informasi hak milik khususnya untuk mengungkapkan kegiatan perusahaan yang menjadi perhatian persoalan lingkungan bisnis mampu mengirimkan sinyal positif ke dunia luar terutama investor yang ingin meningkatkan nilai perusahaan. Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan tercermin dalam *green accounting*, yang memuat informasi tentang kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan sebagai bukti bahwa perusahaan telah menyelesaikan pembangunan berkelanjutan, yang ditandai dengan nilai perusahaan yang tinggi.

2.2 *Green Accounting*

2.2.1 *Pengertian Green Accounting*

Green accounting adalah bidang akuntansi yang begitu luas mencakup di berbagai tingkat seperti nasional, keuangan dan manajemen. Akuntansi hijau atau lingkungan dalam arti luas bertujuan untuk menyediakan Informasi lingkungan untuk pemangku kepentingan eksternal dan internal (Riyadh *et al.*, 2020). *Green accounting* dapat digunakan dalam mengungkap potensi manfaat yang dapat dihasilkan oleh perusahaan dalam menginvestasi lingkungan dengan mendapatkan keuntungan dan menghindari kewajiban lingkungan (De & Friend, 2006).

Menurut Cohen dkk (2011), *green accounting* didefinisikan sebagai gaya akuntansi yang mencakup biaya *overhead* dan manfaat kegiatan ekonomi, seperti dampak lingkungan dan konsekuensi dari keputusan bisnis dan rencana bisnis. *Green accounting* adalah sebuah konsep di dimana perusahaan mengutamakan efisiensi dan efektifitas dalam proses produksi dengan menggunakan sumber daya secara berkelanjutan sehingga perusahaan mampu dalam mengembangkan perusahaan dengan fungsi lingkungan secara selaras dan dapat membawa manfaat bagi masyarakat (Endiana dkk. 2020).

Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau *United States Environmental Protection Agency* (US EPA) adalah fungsi penting dari akuntansi hijau adalah penyajian biaya lingkungan untuk pemangku kepentingan perusahaan yang dapat mempromosikan perusahaan dengan mengidentifikasi

peluang untuk mengurangi atau menghindari biaya waktu pada saat yang sama dengan meningkatkan kualitas lingkungan. Menurut Aniela, (2012) dalam Hamidi (2019) *green accounting* adalah akuntansi yang mengidentifikasi, mengukur, menjelaskan dan mengungkapkan biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan berkaitan dengan lingkungan. *Green accounting* adalah proses akuntansi untuk transaksi keuangan, kepedulian sosial dan lingkungan secara terpadu untuk menghasilkan informasi akuntansi yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan (Wangi dkk, 2020).

Green accounting di bidang akuntansi ingin mencoba menghubungkan aspek lingkungan dari anggaran dengan biaya operasional perusahaan (Putri *et al.*, 2019). *Green accounting* merupakan bagian dari divisi *accounting* yang berfokus pada masalah sosial dan ekologis yang mendesak perusahaan untuk mengungkapkan biaya lingkungan yang terkait dengan perlindungan lingkungan perusahaan. *Green accounting* adalah sebuah proses pengumpulan, klasifikasi, pengukuran, pencatatan dan pelaporan biaya topik lingkungan perusahaan dalam laporan tahunan sehingga perusahaan mampu menilai manfaat dari biaya lingkungan yang dikeluarkan, kemudian melaporkannya sebagai informasi keuangan dan investor dapat menggunakan *green accounting* sebagai alat manajemen lingkungan mampu menjalin komunikasi dengan masyarakat (Ningsih & Rachmawati, 2017). *Green accounting* sebagai sarana komunikasi bisnis kepada masyarakat yang menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kinerja di lingkungan sekitarnya. Perusahaan sangat perlu menerapkan *green accounting* dalam melaporkan informasi yang komprehensif tentang keuangan, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, para pengambil keputusan dapat memperoleh informasi itu terutama terkait dengan lingkungan sehingga perusahaan dapat membuat keputusan lebih baik. Perusahaan yang menggunakan *green accounting* akan terus berlanjut dengan tujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang mengarah pada biaya lingkungan, sehingga nilai perusahaan berkurang dan tidak dapat menghasilkan keuntungan dengan mengorbankan lingkungan (Utomo, 2019).

Tujuan utama *green accounting* adalah untuk memberikan informasi tentang kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, selain di samping informasi

tersebut diharapkan dapat menciptakan pembukuan konvensional. Sebenarnya sangat beragam definisi *green accounting* yang dikemukakan oleh berbagai peneliti, yaitu mendefinisikan *green accounting* sebagai area yang terdiri dari tiga konteks berbeda: akuntansi keuangan, akuntansi bisnis dan akuntansi pendapatan nasional di berbagai tingkat di tingkat nasional, regional dan perusahaan dan berlaku untuk serangkaian produk, fasilitas, aktivitas, atau sistem (Riyadh *et al.* 2020)

2.2.2 Pengukuran *Green Accounting*

2.2.2.1 Pengungkapan lingkungan.

Pengungkapan lingkungan didefinisikan sebagai pengungkapan informasi terkait dengan isu-isu sosial dan ekologis dalam laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan lingkungan adalah kumpulan informasi masa lalu, sekarang dan masa depan yang berkaitan dengan aktivitas dan kinerja perusahaan lingkungan termasuk informasi tentang dampak keuangan yang dihasilkan dari keputusan atau tindakan dalam pengelolaan lingkungan oleh perusahaan (Mikial *et al.*, 2019). Pengungkapan informasi dapat mengurangi asimetri informasi dalam mempengaruhi sikap pengguna informasi atau prospek yang tersedia atau tidak dalam membangun, mempertahankan atau meningkatkan hubungan penyedia informasi tertentu (Huang & Chen, 2015). Menurut Sulistiawati & Dirgantara (2017) dalam meningkatkan citra perusahaan, pengungkapan lingkungan menjadi salah satu faktor terpenting. Informasi lingkungan tidak hanya diperlukan untuk pemangku kepentingan dan pemegang obligasi, tetapi juga untuk oleh masyarakat karena perusahaan yang semakin peduli dengan informasi tersebut termasuk kelestarian lingkungan (Ushani dkk, 2020).

Dalam penelitian ini *green accounting* diukur dengan beberapa aspek yang digunakan sebagai alat ukur yaitu pengungkapan biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pengukuran pengungkapan biaya lingkungan berarti pengungkapan bisnis atau kegiatan lingkungan perusahaan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan pada perusahaan. Pengungkapan informasi lingkungan didefinisikan sebagai pengungkapan informasi yang dilakukan oleh dalam laporan tahunan

perusahaan untuk memecahkan masalah lingkungan sosial yang terkait dengan kegiatan atau bisnis perusahaan. Pengungkapan lingkungan bersifat sukarela sebagai bagian dari pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan (Hapsoro dan Adyaksana, 2020). Bentuk pemeliharaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan diberikan dalam laporan tahunan pada bagian pengelolaan lingkungan dengan beberapa kelompok biaya lingkungan. Biaya lingkungan terdiri dari semua biaya yang dapat digunakan untuk mengukur ketidakpastian terkait dengan biaya produksi, sistem, fasilitas perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Biaya lingkungan pada dasarnya berarti biaya produk, proses, sistem atau peralatan yang penting untuk pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik.

Menurut *Environmental Protection Agency* (EPA), biaya lingkungan adalah biaya internal dan eksternal yang terkait dengan semua biaya dari aktivitas yang diterapkan atau dilaksanakan untuk mengatasi dampak lingkungan dari aktivitas yang konsisten dengan tujuan perusahaan dari grup dan perusahaan terhadap perlindungan lingkungan. Perusahaan melaporkan biaya lingkungan dalam laporan tahunan mereka dalam berbagai versi dan dalam bahasa mereka sendiri. Berikut adalah definisi biaya lingkungan untuk penelitian ini dan contoh biaya :

1. Pengungkapan Biaya Pengelolaan Lingkungan

Pengungkapan biaya pengelolaan lingkungan adalah pengungkapan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pelaksanaan perlindungan lingkungan dalam pengelolaan masalah lingkungan, pengembangan lingkungan, pemanfaatan lingkungan dan pengawasan lingkungan. Biaya ini ditanggung oleh perusahaan dengan bertujuan untuk mencapai kelestarian hubungan antara manusia dan lingkungan sebagai bentuk pembangunan menyeluruh. Misalnya: biaya efisiensi energi dan air, biaya pengelolaan sumber daya, biaya pengelolaan kualitas udara, biaya pemantauan lingkungan dan biaya bantuan/izin lingkungan.

2. Pengungkapan Biaya Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan

Pengungkapan biaya perlindungan dan perlindungan lingkungan adalah pengungkapan biaya yang dikeluarkan untuk melindungi kegiatan usaha dan mencegah kerusakan lingkungan negatif jangka panjang. Misalnya: biaya perlindungan lingkungan, biaya penggunaan sumber daya, biaya bisnis

proses/produk untuk meminimalkan polusi, biaya perlindungan lingkungan, biaya konservasi alam/energi, biaya konservasi keanekaragaman hayati flora/satwa, biaya pertanian, biaya pengurangan/pengendalian emisi, biaya pengendalian erosi, dan biaya efektif gas rumah kaca di masa depan.

3. Pengungkapan Biaya Pengelolaan dan Pengolahan Limbah

Pengungkapan biaya pengelolaan dan penanganan sampah merupakan pengungkapan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dihasilkan dalam penanganan pengolahan sebelum dibuang dari proses kegiatan produksi kedalam lingkungan sekitar. Misalnya: biaya pencegahan dan pengendalian limbah, biaya pengelolaan limbah, biaya daur ulang limbah dan biaya kompensasi untuk lingkungan yang tercemar limbah.

4. Pengungkapan Biaya Rehabilitasi Lingkungan

Pengungkapan biaya pemulihan lingkungan merupakan pengungkapan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memulihkan lingkungan sekitar, memulihkan struktur tanah dan meningkatkan penggunaan lahan. Pembayaran biaya ini dapat mendukung pertumbuhan kembali tanaman di lahan kritis perusahaan atau lahan yang telah digunakan. Misalnya: biaya konservasi lahan, biaya pasca tambang, biaya restorasi, biaya pembersihan vegetasi, biaya lingkungan tercemar dan biaya reboisasi/penanaman pohon.

5. Pengungkapan Biaya Hubungan Masyarakat

Pengungkapan biaya hubungan masyarakat adalah pengungkapan biaya yang dikeluarkan untuk lingkungan sosial perusahaan (masyarakat) yang berlokasi di dekat perusahaan atau pabrik yang produksinya berada di bawah tanggung jawab perusahaan. Contoh: biaya studi lingkungan, biaya medis bisnis residen, biaya kerugian lingkungan kesehatan, biaya kewajiban lingkungan, biaya daya tarik lingkungan, dan biaya penelitian/penyelidikan lingkungan.

Selain itu, penelitian mengevaluasi pengungkapan lingkungan di perusahaan dapat menggunakan standar *Global Report Initiative* (GRI). GRI adalah organisasi berbasis jaringan yang memimpin perkembangan dunia dan memanfaatkan *framework* secara maksimal dalam pelaporan keberlanjutan dan GRI terus berkomitmen untuk itu meningkatkan eksistensi kepedulian lingkungan dan dapat diterapkan di seluruh dunia. GRI adalah satu badan yang membuat

standar pelaporan keberlanjutan global pertama dan dikenal sebagai standar GRI. GRI didirikan di Boston pada tahun 1997, dengan harapan standar GRI yang dirancang dapat diterapkan secara universal.

The Global Reporting Initiative (GRI) adalah jaringan independen besar yang terdiri dari beberapa *interest group* dan diluncurkan pada tahun 1997 sebagai proyek bersama LSM Amerika, yaitu *Coalition for Environmentally Responsible Economics (CERES)* dan badan PBB *The United Nations Environment Program (UNEP)*. Menurut Urip (2014:87), GRI menjadi lembaga independen di 2002, seiring dengan perjalanannya, GRI terus berlanjut disempurnakan 22 Mei 2013, GRI-G4 diresmikan di Amsterdam. Pedoman GRI G4 merupakan generasi keempat yang diterbitkan oleh GRI dan merupakan penyempurnaan dari pedoman sebelumnya. Untuk memperbaharui standar GRI G3 yang menjadi GRI G4 dimaksudkan untuk membantu perusahaan dalam melakukan hal pembuatan laporan keberlanjutan dengan informasi penting tentang masalah organisasi yang paling kritis. GRI G4 menekankan pada pelaporan *green accounting* yang menekankan bagaimana perusahaan mengungkapkan biaya yang terkait dengan penanggulangan akibat dampak penurunan kualitas lingkungan sebagai biaya yang harus dinyatakan oleh perusahaan.

Mengenai misi G4 di GRI, dalam mengembangkan dan menyebarluaskan pedoman untuk pelaporan keberlanjutan secara global. Perusahaan dapat menerapkan pedoman ini secara sukarela melaporkan dimensi ekonomi, ekologi dan sosial dari semua kegiatan perusahaan serta produk dan layanannya.

Dampak yang akan sering ditimbulkan oleh kegiatan operasional perusahaan, menurut *Global Reporting Initiative (GRI) G4* antara lain:

1. Dampak Ekonomi

Global Reporting Initiative (GRI) G4 menjelaskan dampak dari ekonomi langsung sebagai perubahan potensi produktif dari kegiatan ekonomi yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan pemangku kepentingan serta perspektif pembangunan jangka panjang. Sedangkan yang dimaksud dengan dampak ekonomi tidak langsung adalah konsekuensi tambahan yang timbul dari pengaruh langsung transaksi keuangan dan arus kas antara organisasi dan pemangku kepentingannya

2. Dampak Lingkungan

Dampak yang mungkin ditimbulkan oleh operasi perusahaan di lingkungan dinyatakan dalam 9 aspek, yaitu:

- (1) aspek sumber daya atau bahan;
- (2) aspek energi;
- (3) aspek air;
- (4) aspek keragaman organik;
- (5) aspek masalah;
- (6) aspek produk dan layanan;
- (7) aspek kepatuhan;
- (8) aspek transportasi; dan
- (9) aspek lingkungan secara umum.

3. Dampak Sosial

GRI G4 membagi dampak sosial menjadi 4 kategori, yaitu hak hak asasi manusia, tenaga kerja, masyarakat dan kewajiban produk.

2.3 *Good Corporate Governance*

2.3.1 *Pengertian Good Corporate Governance*

Corporate governance atau tata kelola perusahaan selalu menjadi pembelajaran dari waktu ke waktu yang tidak akan pernah usang. Basis implementasi yang akan berdampak positif pada *corporate governance*. Kata *governance* berasal dari bahasa latin yaitu *governance* berarti mengarahkan dan mengendalikan, kemudian diadopsi menjadi *corporate governance*, yang didefinisikan sebagai upaya untuk mengarahkan dan mengendalikan operasi perusahaan (Siregar, 2018). Istilah *corporate governance* (CG) pertama kali diperkenalkan oleh Komite Cadbury pada tahun 1992 dalam laporannya dikenal sebagai *Cadbury Report* (Tjager *et al.*, 2003). Pemicu hadirnya *corporate governance* karena publikasi laporan *cadbury* dengan istilah *good behaviour* yang merekomendasikan perlu adanya kerangka pengawasan yang kemudian dikenal sebagai *corporate governance*. Dalam hal ini *corporate governance* didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemilik saham, pengurus perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan dan menghubungkan

pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan hak dan kewajibannya, yaitu sistem mengelola dan mengendalikan perusahaan (Cadbury Committee, 1992).

Ada banyak definisi *corporate governance* definisi tersebut dipengaruhi oleh teori yang mendukung perusahaan dan masyarakat yang dapat diturunkan dari dua teori, yaitu teori pemegang saham (*shareholder theory*) dan teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*).

Teori pemegang saham menyatakan bahwa perusahaan diciptakan dan dilaksanakan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik/pemegang saham sebagai hasil dari investasi yang dilakukan. Teori pemegang saham sering dikenal sebagai teori bisnis klasik yang diperkenalkan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Definisi *corporate governance* diberikan berdasarkan teori partisipasi menurut Monks dan Minow (1995) yaitu hubungan beberapa partisipan (pemilik/investor dan manajemen) untuk menentukan arah dan kinerja perusahaan. Definisi lain dikemukakan oleh Shleifer dan Vishny (1997) yang menyatakan bahwa *corporate governance* adalah suatu bentuk atau mekanisme untuk membujuk para pemilik modal dalam mencapai hasil pengembalian yang sepadan dengan investasi yang dilakukan.

Teori pemangku kepentingan yang diperkenalkan oleh Freeman (1984) menyatakan bahwa perusahaan merupakan badan yang terafiliasi dengan pihak lain dari pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Definisi pihak yang berkepentingan ini meliputi karyawan, pelanggan, kreditur, pemasok, dan masyarakat dekat tempat perusahaan beroperasi. Adapun definisi *good corporate governance* dari Cadbury Committee yang berdasar pada teori *stakeholder* adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, administrator, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak yang berkepentingan lainnya, baik internal maupun eksternal, berhubungan dengan hak dan tugasnya.

Beberapa lembaga di Indonesia mengusulkan definisi *good corporate governance*, diantaranya oleh FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) pada tahun 2000 mendefinisikan *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang digunakan dalam pengelolaan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham untuk jangka panjang, dengan terus

memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Pengertian lain dari *corporate governance* sesuai keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pengembangan BUMN No.23/M.PM/BUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik GCG di Perseroan Terbatas adalah sebuah tata kelola perusahaan yang merupakan prinsip bisnis yang sehat yang diperlukan diterapkan dalam manajemen perusahaan hanya untuk kepentingan untuk menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Berdasarkan definisi tersebut, jelas bahwa hal ini adalah upaya semua masyarakat yang terlibat di dalam perusahaan untuk menjalankan usahanya dengan baik sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

2.3.2 Prinsip Dasar *Good Corporate Governance*

Tujuan *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai bagi semua orang bagian yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal, termasuk direksi, komisaris, karyawan dan pihak eksternal termasuk investor, kreditur, pemerintah, masyarakat dan pihak lainnya berkepentingan (*stakeholder*). Dalam praktiknya, *corporate governance* berbeda dari satu negara dengan negara yang lain karena terkait dengan sistem ekonomi, hukum, struktur properti, sosial dan budaya. Perbedaan praktis ini menimbulkan beberapa versi yang mengacu pada prinsip-prinsip *corporate governance* tetapi memiliki dasar yang sama.

Menurut Laporan Cadbury (1992), prinsip dasar *good corporate governance* adalah: keterbukaan, integritas dan tanggung jawab. Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), prinsip dasar GCG antara lain kewajaran (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), dan responsibilitas (*responsibility*). Menurut KNKG (2006) dalam *good corporate governance* ada lima prinsip yang harus diterapkan oleh masyarakat yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, dan keadilan atau kesetaraan. Kelima prinsip ini diperlukan untuk membantu perusahaan mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi. Kelima prinsip tersebut didefinisikan sebagai berikut:

a. Transparansi (*Transparency*).

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus memberikan informasi yang material dan relevan secara sederhana akses dan pemahaman pemangku kepentingan. Perusahaan harus ekspresikan secara aktif tidak hanya pada akar masalahnya tetapi sesuai regulasi yang telah diatur oleh undang-undang dan peraturan, dan apa yang penting untuk pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya dalam membuat keputusan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*).

Terkait dengan prinsip akuntabilitas, perusahaan harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan adil, sehingga segala pengelolaan perusahaan harus benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan. Dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas adalah prasyarat diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

c. Responsibilitas (*Responsibility*).

Untuk prinsip responsibilitas atau prinsip tanggung jawab, perusahaan harus mematuhi hukum dan peraturan serta memenuhi tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan, memungkinkan untuk beroperasi perusahaan dalam pengembangan jangka panjang untuk perusahaan dan pengakuan yang baik sesuai *good corporate governance*.

d. independen (*Independency*).

Untuk memperlancar penerapan prinsip-prinsip GCG, perusahaan harus diatur secara independen sehingga masing-masing bidang perusahaan tidak saling eksklusif ataupun dominan dan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*).

Dalam menjalankan bisnis, suatu perusahaan harus bisa dapat mempertimbangkan kepentingan pemegang saham mayoritas dan minoritas serta pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan prinsip kewajaran dan kesetaraan.

2.3.3. Pemegang Saham Orang Dalam

Pemegang saham orang dalam adalah istilah yang mengacu pada direktur atau pejabat perusahaan yang memiliki 10% atau lebih hak suara dari saham

(Jensen dan Meckling, 1976 dalam Kyere dan Ausloos (2021). Menurut Jensen dan Meckling (1976), tingkat kepemilikan saham oleh orang dalam pada umumnya mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) dalam Kyere dan Ausloos (2021) menemukan bahwa meningkatkan kepemilikan orang dalam mengurangi biaya agensi. Secara logika di balik wawasan ini adalah bahwa eksekutif yang memiliki ekuitas yang signifikan di perusahaan dan tidak akan berinvestasi dalam proyek berisiko yang berbahaya atau tidak bermanfaat. Oleh karena itu, sebagai aturan umum, investor harus berhati-hati dalam berinvestasi dalam proyek dengan potensi keuntungan yang tinggi.

2.3.4. Dewan Direksi

Dewan direksi adalah istilah lain dari pejabat perusahaan yang mempunyai kekuasaan dalam memberikan keputusan. Direksi merupakan salah satu organ perusahaan yang mempunyai payung hukum dengan tugas dan tanggung jawab secara bersama. Agar seluruh anggota direksi dapat menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing serta menggunakan tugas pokok dan fungsinya dalam mengambil keputusan sesuai dengan kapasitasnya maka perlu ditekankan bahwa direksi mempunyai tanggung jawab bersama. Namun, tanggung jawab tetap berada pada direktur utama/ presiden direktur, yang bertanggung jawab mengkoordinasikan aktivitas para direktur. Kekhawatiran pemegang saham terkait dengan kemampuan dewan direksi untuk mengawasi/mengendalikan manajer yang bertindak demi kepentingan pemilik, sehingga muncul asumsi adanya perusahaan dengan *board size* direksi cenderung memiliki pengawasan yang efektif yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

2.3.5 Komisaris independen

Dewan komisaris adalah badan perusahaan yang memiliki mandat pengawasan umum atau khusus, tunduk pada anggaran dasar dan rumah tangga serta memberikan nasihat kepada direktur utama. Anggota independen dipilih berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keputusan Rapat Pemegang Saham umumnya didasarkan pada jumlah saham yang dimiliki oleh

satu orang per suara, bukan pada jumlah suara yang dikeluarkan. Komisaris Independen bertanggung jawab untuk memantau dan memberikan informasi kepada para dewan direksi. Sejalan dengan itu, fungsi komisaris independen adalah memantau kualitas informasi kinerja yang disampaikan oleh direktur dan memastikan integritas laporan kinerja direktur. Dengan komisaris independen menempati posisi yang sangat penting dalam perusahaan tentunya keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh para direksi.

Di dalam perusahaan, wajib memiliki sekurang-kurangnya satu komisaris independen yang berada di luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya. Dari segi hukum, ada acuan yang menjadi dasar bagi para wali independen; yakni pertama acuan terkait jabatan auditor pada perseroan terbatas menurut ketentuan Pasal 108 sampai dengan 121 KUHP No. 40 Tahun 2007; Ketentuan pasal 80 UU No. 8 Tahun 1995 dalam kaitannya dengan pasar modal, khususnya mengenai pertanggungjawaban atas informasi yang tidak benar dan menyesatkan, dimana komisaris adalah pihak yang terancam oleh ketentuan ini, jika ikut menandatangani dokumen yang berkaitan dengan penyampaian informasi kepada publik dalam rangka pernyataan keuangan. Untuk setiap calon emiten yang akan mencatatkan saham di bursa efek, Bursa Efek Indonesia mewajibkan adanya komisaris independen untuk mengelola emiten tersebut; Komite Nasional *Good Corporate Governance* telah mengeluarkan pedoman mengenai keberadaan auditor independen di perusahaan publik, pada prinsipnya auditor bertanggung jawab untuk memantau kebijakan dan tindakan direksi dan memberikan saran kepada manajer bila diperlukan.

Komisaris independen adalah pengawas direktur, pemegang saham pengendali, pejabat perusahaan yang mengawasi jalannya perusahaan, atau pejabat yang tidak terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham pengendali. Pengertian komisaris independen sebenarnya berasal dari pengertian komisaris dalam Pasal 1 Ayat 5 UU Perseroan Terbatas 1995. Mengawasi secara umum dan/atau secara khusus dan memberi nasihat kepada direktur tentang manajemen perusahaan. Seseorang yang berstatus

komisaris independen memiliki dua kriteria. Kriteria atau persyaratan komisaris independen adalah:

- a. Kriteria komisaris independen menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), yaitu:
 1. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen;
 2. Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan;
 3. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai bagian eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu;
 4. Komisaris independen bukan merupakan penasihat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut;
 5. Komisaris independen bukan merupakan pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut;
 6. Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut;
 7. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apa pun atau hubungan lainnya yang dapat, atau dianggap secara signifikan menghambat kemampuan perusahaan untuk bertindak demi kepentingan terbaik auditor. Kriteria komisaris independen ini diambil FCGI dari kriteria otoritas bursa Efek Australia tentang *Outside Directors*.

b. Kriteria komisaris independen menurut Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 Jakarta tanggal 19 Juli 2004, yaitu:

1. Jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris;
2. Komisaris independen tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik;
3. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau pemegang saham mayoritas atau pemegang saham utama dari perusahaan tercatat yang bersangkutan;
4. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris lainnya dari perusahaan tercatat yang bersangkutan;
5. Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan atau hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan tercatat;
6. Komisaris independen harus berasal dari luar emiten atau perusahaan publik;
7. Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang undangan di bidang pasar modal;
8. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa para komisaris independen pada dasarnya memenuhi peran yang sama sebagai komisaris dengan memastikan penerapan strategi perusahaan, mengawasi tata kelola perusahaan dalam pengelolaan korporasi dan memastikan akuntabilitas. Pada hakekatnya komisaris independen merupakan mekanisme pengawasan dan pengawasan yang independen/netral untuk memberikan pengarah dan pengarah kepada manajemen perusahaan.

Menurut Surya *et al.*, (2006), Komisaris independen bersama dewan komisaris memiliki tugas tugas utama meliputi:

1. Mengevaluasi dan mengarahkan strategi perusahaan, menentukan rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana bisnis; menetapkan tujuan kerja; memantau kinerja dan kinerja operasi perusahaan; serta mengawasi penggunaan modal, investasi dan penjualan aset perusahaan. Mandat ini terkait dengan peran dan tanggung jawab, serta mendukung upaya keseimbangan kepentingan manajemen (*accountability*);
2. Meninjau sistem untuk menentukan gaji eksekutif di posisi kunci dan gaji anggota dewan, serta memastikan proses pengangkatan anggota dewan yang transparan (*transparency*) dan adil (*fairness*);
3. Memantau dan menyelesaikan benturan kepentingan di tingkat manajemen, anggota direksi dan anggota direksi, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan. Tugas ini termasuk memastikan perlindungan kepentingan pemegang saham (*fairness*);
4. Memantau pelaksanaan tata kelola dan melakukan perubahan bila perlu, seorang komisaris independen yang harus menjalankan transparansi (*transparency*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*) di bidang ini.
5. Memantau proses keterbukaan dan komunikasi yang efektif di dalam perusahaan (*OECD Principles of Corporate Governance*). Proses keterbukaan (*transparency*) ini memastikan tersedianya informasi yang tepat waktu dan jelas.

2.3.6. Dualitas CEO

Di beberapa perusahaan, CEO mungkin memiliki dua peran. Pertama, menjabat sebagai ketua dewan eksekutif dan kedua direktur pelaksana (Lam & Lee, 2007). Kekhawatiran utama dualitas CEO adalah bahwa dominasi tim manajemen dewan dapat mempertanyakan kontrol agenda pertemuan (Firstenberg dan Malkiel, 1994). Dalam hal ini, CEO/Pimpinan dapat memutuskan bahwa hanya informasi yang melayani kepentingan pribadinya yang akan dikirim ke

dewan direksi. Akibatnya, pada perusahaan yang tidak memiliki pengawasan yang kuat terhadap mekanisme tata kelola perusahaan, manajemen lebih mampu mengejar kepentingannya sendiri (Fama dan Jensen, 1983).

Indonesia menganut sistem dewan dua tingkat yang membutuhkan anggota direksi sebagai pengelola dan anggota dewan komisaris sebagai pengawas dari dewan direksi. Oleh karena peraturan saat ini, di perusahaan Indonesia dualitas CEO mungkin tidak memiliki hubungan secara langsung yang bertugas di dewan direksi maupun komisaris. Sebaliknya, jika dua kursi memiliki ikatan keluarga, perusahaan masih menggunakan sistem kekerabatan dengan direksi maupun komisaris. Banyak dari perusahaan semula adalah bisnis keluarga, tetapi akhirnya telah berkembang dan menjadi perusahaan publik (Putri dan Deviesa 2017).

2.3.7. Komite Audit

2.3.7.1 Pengertian Komite Audit

Sesuai keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep 63/BL/2012, Komite Audit merupakan komite yang dibentuk dan bertanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya tugas dan fungsi dewan komisaris. Emiten atau perusahaan publik wajib membentuk komite audit yang bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Peran komite audit adalah memastikan integritas pelaporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar tata kelola perusahaan dan memastikan kepatuhan entitas seperti pengungkapan wajib (Davidson, Goodwin-Stewart, & Kent, 2005 dalam Kyere dan Martin (2021)).

Anggota Komite Audit biasanya akan diangkat dan diberhentikan langsung oleh dewan komisaris. Struktur dan keanggotaan komite audit adalah sebagai berikut:

1. Komite audit paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota yang harus berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik
2. Komite audit langsung diketuai oleh komisaris independen.
3. Komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang sedang bekerja atau sedang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin, mengendalikan, merencanakan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam kurun waktu enam bulan terakhir;
- b. Tidak mempunyai saham pada emiten atau perusahaan publik tersebut baik langsung maupun tidak langsung;
- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama dan;
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

Persyaratan Keanggotaan Komite Audit berdasarkan keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-643/BL/2012 adalah sebagai berikut:

- 1. Anggota komite audit wajib mempunyai kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, integritas yang tinggi, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- 2. Anggota komite audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan proses audit, manajemen risiko, layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan lainnya.
- 3. Anggota komite audit harus mematuhi kode etik komite audit yang telah ditetapkan oleh emiten atau perusahaan publik.
- 4. Anggota komite audit harus bersedia meningkatkan kompetensi secara kontinuitas melalui pelatihan maupun pendidikan.
- 5. Anggota komite audit wajib memiliki setidaknya satu anggota yang berlatar belakang disiplin ilmu dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
- 6. Anggota komite audit bukan merupakan orang dalam Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik, Kantor Akuntan Publik, atau pihak

lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu enam bulan terakhir.

7. Anggota komite audit bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengendalikan, merencanakan, memimpin, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam kurun waktu enam bulan terakhir kecuali komisaris independen.
8. Anggota komite audit tidak ada mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut.
9. Dalam hal anggota, komite audit memperoleh saham emiten atau perusahaan publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama enam bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
10. Anggota komite audit tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut.
11. Anggota komite audit tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut

2.3.7.2 Frekuensi Pertemuan Rapat Komite Audit

Frekuensi rapat rutin komite audit ditentukan oleh komite audit sendiri dan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan direksi yang diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga perusahaan. Ketua Otoritas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-63/BL/2012 tentang pembentukan dan kebijakan operasional, komite audit wajib mengadakan satu kali rapat secara berkala sekurang-kurangnya tiga kali. Jumlah bulan dalam satu masa kerja komite audit. Rapat komite audit hanya dapat diselenggarakan apabila tidak kurang dari setengah jumlah anggota yang hadir yaitu.

Frekuensi dan isi rapat bergantung pada peran dan tanggung jawab komite audit jumlah rapat ditentukan oleh besar kecilnya perusahaan dan lingkup tugas yang diberikan kepada komite audit. Pada umumnya komite audit bersidang tiga sampai empat kali dalam setahun (Sitepu, 2020).

2.4 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan dapat dijelaskan sebagai hasil pencapaian tingkat keberhasilan perusahaan dalam memaksimalkan tujuannya. Terdapat banyak pengukuran untuk mengukur pergerakan dari nilai perusahaan salah satunya yaitu harga pasar saham yang digunakan investor sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi. Nilai perusahaan adalah harga pasar suatu saham yang dianggap memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dengan mempertimbangkan kenaikan harga saham guna memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Kenaikan nilai perusahaan secara signifikan akan mampu mempertahankan perusahaan dalam jangka panjang. Keadaan tersebut mampu meningkatkan aktivitas operasi perusahaan dan memaksimalkan laba, serta akan meningkatkan nilai perusahaan. Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaannya. Peningkatan nilai suatu perusahaan adalah bagian terpenting yang diharapkan oleh pemegang saham, dikarenakan nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan pengembalian saham dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Kesejahteraan pemegang saham tidak hanya berdasarkan tingkat *return* saham yang tinggi tetapi juga merepresentasikan pendanaan dan manajemen aset perusahaan yang baik sehingga mampu mengoptimalkan nilai perusahaan.

Pengukuran nilai perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan, satu di antaranya adalah rasio penilaian. Rasio penilaian menjadi standar untuk mengaitkan harga pasar saham dengan nilai buku saham. Rasio penilaian dapat membantu manajemen mengetahui bagaimana cara investor menilai kinerja perusahaan dan melihat peluang masa depan. Mengukur nilai perusahaan menggunakan rasio penilaian terbagi lagi menjadi beberapa metode, satu di antaranya adalah Tobin's Q. Rasio Tobin's Q merupakan salah satu metode pengukuran yang dinilai terbaik dibandingkan dengan rasio lainnya, karena rasio

Tobin's Q mampu memberikan informasi terbaik dengan menafsirkan segala kegiatan perusahaan.

James Tobin sebagai pemenang hadiah nobel adalah seorang ekonom dan orang pertama yang menemukan pengukuran Tobin's Q. James Tobin mengukur nilai perusahaan menggunakan Tobin's Q dengan membandingkan nilai pasar saham yang ditambah dengan nilai buku dari total hutang dan dibagi dengan nilai buku dari total aset. Nilai total yang digunakan menunjukkan bahwa perusahaan berfokus kepada kreditur sekaligus investor dalam bentuk saham, sehingga sumber dana bagi perusahaan tidak hanya saham, tetapi juga pinjaman dari kreditur. Ketika sebuah perusahaan mengukur nilai perusahaan dengan Tobin's Q, kemudian perusahaan tersebut mendapatkan nilai Tobin's Q > 1 maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut mendapatkan nilai pasar yang lebih. Besar nilai Tobin's Q suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki potensi perkembangan perusahaan yang baik karena, nilai buku total aset yang bertambah besar dibandingkan dengan nilai pasar aset perusahaan akan meningkatkan keinginan investor untuk memiliki saham perusahaan tersebut.

2.5. Kajian Empiris

Penelitian yang penulis teliti berbeda dengan penelitian sebelumnya karena terdapat perbedaan pada objek dan rasio penelitian, yaitu perusahaan sektor *real estate* dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Terdapat penelitian – penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian ini. Berikut ini adalah uraian dari beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Permasalahan Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
1	Hanifah, I. A., & Ismawati, I. (2022).	Bagaimana pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan,	Variabel independen: Kinerja Lingkungan, Kinerja Keuangan	Metode <i>purposive sampling</i> , diperoleh 65 sampel perusahaan	Terdapat pengaruh antara kinerja lingkungan dan kinerja

		kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan, kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan sebagai variabel intervensi	Variabel dependen: Nilai Perusahaan Variabel Intervening: Kinerja Keuangan	manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode periode 2016-2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.	keuangan terhadap nilai perusahaan, tidak terdapat pengaruh antara kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan dan kinerja keuangan tidak mampu memediasi antara kinerja lingkungan dan nilai perusahaan
2	Kyere, M., & Ausloos, M. (2021)	<i>How empirically examine the impact of good corporate governance on financial performance of United Kingdom non-financial listed firms.</i>	Variabel Independen (X) X1=Insider shareholding X2 = Board size X3= Board independence X4 = CEO duality X5 = Audit committee Variable Dependen (Y) Y=Financial performance	<i>Five corporate governance mechanisms are examined on two financial performance indicators, return on assets and Tobin's Q, employing cross-sectional regression methodology, an empirical test</i>	<i>Insider shareholding and CEO duality have a negative effect on financial performance, Board size, board independence and audit committee have a positive effect on financial</i>

			Variabel Moderasi (Z) $Z = \text{Firm Size \& Leverage}$	<i>performed on 252 firms listed on London Stock Exchange for the year 2014 .</i>	<i>performance .</i>
3	Lutfiana , D. E. S., & Hermanto, S. B. (2021)	Bagaimana pengaruh mekanisme profitabilitas, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan.	Variabel Independen (X) X1= Profitabilitas X2 = Leverage X3= Ukuran Perusahaan Variabel Dependen (Y) Y = kinerja keuangan	Perusahaan <i>Go Public</i> dalam kelompok Indeks Kompas 100 dari tahun 2018-2019, dengan populasi 100 perusahaan, dan jumlah sampel 118 observasi laporan keuangan dari 59 perusahaan. Metode analisis data dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 25.	Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, Leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap
4	Dewi, P. P., & Narayana, I. P. E.	Bagaimana pengaruh implementasi <i>green accounting</i> ,	Variabel Independen (X) X1= Profitabilitas	Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan pertambangan	Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap kinerja

	(2020).	profitabilitas, dan <i>corporate social responsibility</i> terhadap nilai perusahaan.	X2 = Leverage X3= Ukuran Perusahaan Variabel Dependen (Y) Y = kinerja keuangan	yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 - 2019. Metode analisis data dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan sampel sebanyak 40 perusahaan.	keuangan, Leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
5	Wangi, W. R., & Lestari, R. (2020).	Bagaimana penerapan <i>green accounting</i> , tingkat profitabilitas perusahaan dan menguji pengaruh penerapan <i>green accounting</i> terhadap tingkat profitabilitas perusahaan pada perusahaan manufaktur.	X1= Kinerja Lingkungan X2 = Biaya Lingkungan Variabel Dependen (Y) Y = Kinerja Keuangan	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018 dengan jumlah 143 perusahaan dengan menggunakan metode purposive sampling diperoleh 16 perusahaan yang memenuhi kriteria. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik statistika regresi berganda.	<i>Green accounting</i> yang diukur dengan kinerja lingkungan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas perusahaan, sedangkan penerapan <i>green accounting</i> yang diukur dengan indeks biaya lingkungan dan pengungkapan lingkungan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.

6	Endiana, I., Dicriyani, N. L. G. M., Adiyadnya, M. S. P., & Putra, N.P.M.J.S. (2020).	<i>How green accounting through the application of CSMS can improve the financial performance of manufacturing companies in Indonesia, a developing country.</i>	Variabel Independen (X) X1= Green Accounting Variabel Dependen (Y) Y=Financial Performance Y=Corporate Sustainability	<i>The research sample consisted of 38 companies that had followed PROPER and were indexed on the IDX. Data were analyzed using the Structural Equation Modeling (SEM) method known as the Partial Least Square (PLS) method.</i>	<i>Green accounting by allocating environmental costs appropriately and in accordance with its portion can improve the company's financial performance.</i>
7	Riyadh, Hosam Alden, Maher A. Al-Sham, Henry Hongren Huang, Barbara Gunawan, and Salsabila Aisyah Alfaiza. (2020)	<i>Does green accounting cost have an impact on financial performance in the top 100 multinationals corporations</i>	Variabel Independen (X) X1= environmental cost Variabel Dependen (Y) Y = Financial Performance	<i>Secondary data and multiple regression analysis were employed in this research and the selected corporations were 100 largest multinational corporations in the year 2018.</i>	<i>Green Accounting has a positive effect on financial performance.</i>
8	Faizah, Bella Syafrina	Apakah ada pengaruh penerapan	Variabel Independen (X)	Pemilihan sampel menggunakan	<i>Green accounting yang</i>

	Qolbiati n (2020).	<i>green accounting terhadap kinerja keuangan</i>	X1=Aktivitas Lingkungan X2=Produk Ramah Lingkungan X3= Kinerja Lingkungan Variabel Dependen (Y) Y = Kinerja Keuangan	teknik <i>purposive sampling</i> yang menggunakan kriteria tertentu sebanyak 24 perusahaan dalam empat periode. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda.	diproksikan dengan aktivitas lingkungan, produk ramah lingkungan, dan kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan net profit margin.
9	(Abdurrahman, A, 2019)	<i>How to Impact of Green Accounting on Company Value: Evidence from the Nigerian Companies</i>	Variabel independen: X= <i>Green Accounting</i> Variabel dependen: Y = <i>Company Value</i>	Metode kuantitatif dalam desain penelitian dan mengumpul kan data primer. Peneliti telah menggunakan Smart PLS untuk mendapatkan hasil data. Teknik analisis yang digunakan adalah <i>Confirmatory factor analysis, Discriminant validity and Path assessment.</i>	Membuktikan bahwa, akuntansi keuangan lingkungan, akuntansi biaya lingkungan, akuntansi ekologi, akuntansi pengelolaan lingkungan, dan akuntansi sumber daya alam memiliki hubungan yang kuat dengan nilai perusahaan

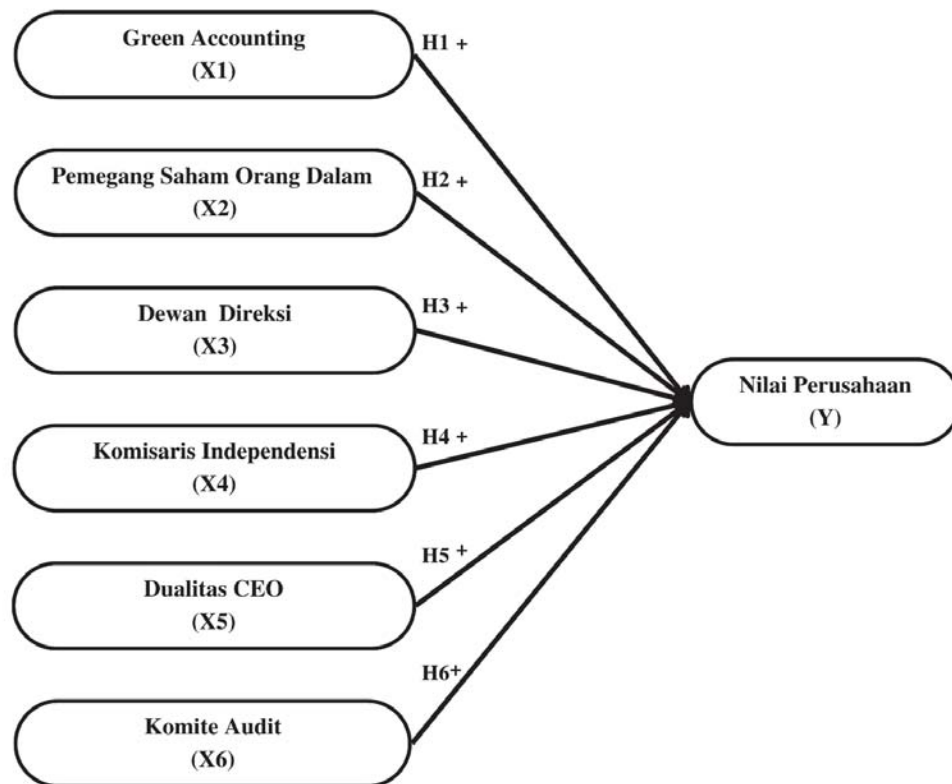
10	Meng, C. Y., Nee, T. W., & Ismail, S. (2019)	<i>How to raise awareness on the importance of green accounting by looking into the effects that it has on the financial performance of companies.</i>	Variabel Independen (X) X1=Quantity Green Accounting Variabel Dependen (Y) Y=Financial Performance	<i>This study conducted in the nature of explanatory to investigate the relationship between the quality of green accounting and financial performance of plantation companies in Malaysia.</i>	<i>Quantity green accounting negatively affects ROA and ROE, but has a positive and significant effect on Tobin's Q</i>
----	--	--	---	---	---

Sumber: Data Olahan (2023)

2.6. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian

2.6.1 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian, setelah melakukan tinjauan kritis terhadap literatur sebaiknya mempersiapkan untuk pengembangan kerangka teoritis (Sekaran dkk, 2016). Pada dasarnya kerangka teoritis atau kerangka pemikiran berisi alur jalan pikiran secara logis dalam menjawab masalah yang didasarkan pada landasan teoritik atau hasil penelitian yang relevan, kerangka logika yang mampu menunjukkan dan menjelaskan masalah yang telah dirumuskan dalam kerangka teori, dan sebagai model penelitian yang dapat disajikan secara skematis dalam bentuk gambar (Widiasworo, 2019). Oleh karena itu, berdasarkan teori penelitian terdahulu, dapat disajikan kerangka konsep penelitian pada gambar sebagai berikut :



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual
Sumber: Data Olahan (2023)

2.6.2. Hipotesis Penelitian

2.6.2.1 Pengaruh *Green Accounting* Terhadap Nilai Perusahaan

Teori pemangku kepentingan mengatakan bahwa suatu perusahaan secara terus-menerus harus menjalankan aktivitas operasinya sesuai dengan batas dan norma di masyarakat. Secara tidak langsung kondisi tersebut membuat perusahaan memiliki ikatan sosial dengan pemangku kepentingan. Perusahaan dituntut selalu responsif pada perubahan sosial maupun lingkungan yang terjadi di masyarakat, hal ini membuat tanggung jawab perusahaan menjadi lebih besar. Berdasarkan penjelasan teori pemangku kepentingan, suatu perusahaan yang telah menerapkan *green accounting* dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut telah menjalankan aktivitas operasinya dengan baik serta perusahaan telah melakukan perlindungan lingkungan dengan menjaga kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan dan mencegah serta menanggulangi dampak buruk dari aktivitas operasi perusahaan

yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Kegiatan atau program lingkungan perusahaan yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan mampu menjadi sinyal berupa informasi kegiatan atau program yang telah dilakukan perusahaan untuk lingkungan.

Menurut teori sinyal, informasi yang disampaikan perusahaan untuk pihak eksternal melalui laporan tahunan menjadi salah satu cara perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Laporan tahunan perusahaan harus menyajikan informasi atas biaya yang dikeluarkan perusahaan dan juga memuat informasi mengenai program lingkungan. Contoh program atau kegiatan yang dilakukan perusahaan adalah melakukan konservasi hutan atau lahan bekas tambang, membuat konservasi hewan, mengelola limbah sebelum dilepaskan kembali ke lingkungan, memberikan edukasi mengenai pelestarian lingkungan kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Informasi tersebut dapat menjadi sebuah sinyal untuk investor dan pihak eksternal perusahaan lainnya, agar dapat membandingkan baik buruknya perusahaan dalam hal kepedulian menjaga dan mengelola lingkungan. Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan menjadi sangat penting dan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Adanya konsep *green accounting* ini, diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan lingkungan yang dihadapi perusahaan yang berpengaruh pada nilai perusahaan.

Penjelasan di atas didukung oleh penelitian (Nurunnisa & Yuliastuti, 2018) setelah menerapkan *green accounting* terjadi kenaikan pertumbuhan harga saham. Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian (Abdurrahman, 2019) yang membuktikan bahwa, akuntansi keuangan lingkungan, akuntansi biaya lingkungan, akuntansi ekologi, akuntansi pengelolaan lingkungan, dan akuntansi sumber daya alam memiliki hubungan yang kuat dengan nilai perusahaan. Hasil kedua penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian (Dewi & Edward Narayana, 2020) yang membuktikan bahwa penerapan *green accounting* berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Penerapan *green accounting* memiliki dampak yang besar pada perusahaan. Artinya, jika perusahaan dapat melakukan dan mengungkapkan *green accounting* dengan baik maka perusahaan dapat menghasilkan citra positif, yang secara tidak langsung dapat meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan kepercayaan kepada

pemangku kepentingan untuk kelangsungan hidup perusahaan di masa depan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, dapat disusun suatu hipotesis sebagai berikut:

H1 : Diduga *Green Accounting* berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Properti Dan *Real Estate* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021.

2.6.2.2 Pengaruh Pemegang Saham Orang Dalam terhadap Nilai Perusahaan

Pemegang saham orang dalam dalam teori keagenan dapat memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sebagai pemilik saham, dewan direksi dan komisaris memiliki kepentingan dalam memaksimalkan keuntungan dan nilai perusahaan, namun sebagai orang dalam, mereka juga dapat memanfaatkan posisi dan informasi yang mereka miliki untuk keuntungan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Jika pemegang saham orang dalam dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan berupaya memaksimalkan nilai perusahaan, maka pengaruh mereka dapat berdampak positif. Namun, jika mereka melakukan tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan untuk keuntungan pribadi, maka pengaruh mereka dapat berdampak negatif. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap pemegang saham orang dalam dan memberikan insentif yang sesuai agar mereka tidak merugikan perusahaan dalam upaya memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini dapat membantu memaksimalkan nilai perusahaan dan mencegah kerugian akibat perilaku tidak etis atau korupsi.

Hipotesis dari pengaruh pemegang saham orang dalam terhadap nilai perusahaan adalah bahwa semakin banyak pemegang saham orang dalam yang memiliki saham perusahaan, maka nilai perusahaan akan meningkat karena pemegang saham tersebut cenderung lebih terlibat dalam operasional perusahaan dan memperhatikan kinerja perusahaan secara lebih detail. Namun, terdapat risiko kecurangan atau manipulasi informasi yang dilakukan oleh pemegang saham orang dalam yang dapat mempengaruhi kinerja dan nilai perusahaan secara negatif. Menurut Dewi, L. S., & Abundanti, N. (2019) dalam studinya

menyimpulkan bahwa pemegang saham orang dalam memiliki hubungan yang positif dengan nilai perusahaan.

H2 : Diduga Pemegang Saham Orang Dalam berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021.

2.6.2.3 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Nilai Perusahaan

Dalam teori keagenan, dewan direksi memiliki peran penting dalam menjaga hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Dewan direksi bertindak sebagai pengawas dan penasihat manajemen, serta menjalankan kebijakan dan strategi yang disetujui oleh pemegang saham. Oleh karena itu, pengaruh dewan direksi terhadap nilai perusahaan sangatlah penting.

Secara umum, pengaruh dewan direksi dalam teori keagenan dapat berdampak positif atau negatif terhadap nilai perusahaan. Apabila dewan direksi berfungsi dengan baik dan efektif dalam menjalankan tugasnya, maka hal tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Misalnya, dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, menjalankan tugas pengawasan dengan baik, dan mengambil keputusan yang tepat. Namun, jika dewan direksi tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan efektif, maka pengaruhnya terhadap nilai perusahaan bisa menjadi negatif. Contohnya, apabila dewan direksi tidak mampu memantau manajemen dengan baik, atau tidak memperhatikan kepentingan pemegang saham, maka hal tersebut bisa berdampak buruk terhadap kinerja perusahaan dan menurunkan nilai perusahaan.

Secara keseluruhan, pengaruh dewan direksi terhadap nilai perusahaan dalam teori keagenan sangat penting. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa dewan direksi diisi dengan orang-orang yang kompeten dan memiliki integritas, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan efektif. Keberadaan dan kualitas dewan direksi yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan. Ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, seperti keahlian dan pengalaman anggota dewan direksi, komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab, serta kemampuan mereka untuk mengambil keputusan strategis yang tepat.

Beberapa penelitian telah menemukan bahwa perusahaan yang memiliki dewan direksi yang baik dan efektif cenderung memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki dewan direksi yang baik. Selain itu, dewan direksi yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong investasi, yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Namun, ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa keberadaan dewan direksi yang kuat dan efektif tidak selalu dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini tergantung pada faktor-faktor lain seperti situasi pasar, lingkungan bisnis, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan Carolina *et., al* (2020) menunjukkan ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

H3 : Diduga Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021.

2.6.2.4 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan

Menurut teori keagenan, pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan dapat dilihat dari tiga aspek utama:

1. Pengawasan dan pengendalian manajemen

Komisaris independen dapat membantu mengawasi dan mengendalikan kebijakan dan tindakan manajemen perusahaan, sehingga mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan perusahaan. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, maka akan meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai perusahaan.

2. Transparansi dan akuntabilitas

Komisaris independen juga dapat memastikan bahwa perusahaan memiliki transparansi dan akuntabilitas yang baik dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan risiko. Dengan adanya transparansi yang baik, maka investor akan lebih percaya dan cenderung membeli saham perusahaan, sehingga meningkatkan nilai perusahaan.

3. Membantu mengurangi konflik kepentingan

Komisaris independen dapat membantu mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham minoritas. Dengan adanya pengawasan

yang ketat, maka manajemen tidak akan melakukan tindakan yang merugikan pemegang saham minoritas, sehingga kepercayaan investor akan meningkat dan nilai perusahaan pun akan naik.

Dalam kesimpulannya, keberadaan komisaris independen sangat penting dalam meningkatkan nilai perusahaan karena mereka dapat membantu mengawasi, memastikan transparansi, akuntabilitas dan mengurangi konflik kepentingan. Dengan adanya kepercayaan dari investor, maka nilai perusahaan akan meningkat dan memberikan suatu keuntungan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan tersebut. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa komisaris independen memiliki kredibilitas yang tinggi dan dapat memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kyere dan Ausloos, 2021) bahwa variabel independen antara lain dewan komisaris, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial dengan variabel kontrol ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

H4 : Diduga Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021.

2.6.2.5 Pengaruh Dualitas CEO terhadap Nilai Perusahaan

Dalam teori keagenan, dualitas CEO adalah situasi di mana seseorang menjabat sebagai CEO dan ketua dewan direksi dalam satu perusahaan. Hal ini dapat berdampak pada nilai perusahaan, baik positif maupun negatif. Dalam sisi positif, dualitas CEO dapat meningkatkan efisiensi perusahaan karena CEO dapat dengan mudah berkomunikasi dengan dewan direksi dan mengambil keputusan lebih cepat. Selain itu, dualitas CEO juga dapat meminimalkan biaya karena hanya satu orang yang memegang dua posisi tersebut. Namun, dalam sisi negatif, dualitas CEO dapat menciptakan konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan

kekuasaan oleh CEO. CEO yang juga menjadi ketua dewan direksi dapat mempengaruhi keputusan dewan direksi dan mengambil keputusan yang lebih menguntungkan dirinya sendiri daripada perusahaan. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan investor dan menurunkan nilai perusahaan. Pengaruh dualitas CEO terhadap nilai perusahaan dalam teori keagenan tergantung pada bagaimana CEO memanfaatkan kekuasaannya dan keputusan yang diambil. Jika dualitas CEO diatur dengan baik dan efisien, maka dapat meningkatkan nilai perusahaan, tetapi jika tidak diatur dengan benar, maka dapat menurunkan nilai perusahaan.

Dualitas CEO dapat mempengaruhi efektivitas manajemen perusahaan dan kebijakan strategis yang diambil. Jika seorang CEO juga menjabat sebagai Ketua Dewan Direksi, maka dapat terjadi konflik kepentingan dan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat berdampak pada kinerja perusahaan dan nilai sahamnya. Sejalan dengan pernyataan tersebut yang didukung oleh Hsu et al. (2021) bahwa dualitas CEO memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

H5 : Diduga Dualitas CEO berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021.

2.6.2.6 Pengaruh Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan

Dalam teori keagenan, komite audit dianggap sebagai salah satu mekanisme pengendalian yang dapat membantu mengurangi konflik keagenan antara manajemen dan pemegang saham. Dengan adanya komite audit, maka manajemen akan lebih terkendali dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Adanya komite audit yang efektif dapat membantu memastikan keandalan dan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Hal ini akan membantu meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan dan pada gilirannya akan meningkatkan nilai perusahaan.

Selain itu, komite audit juga dapat membantu memastikan bahwa manajemen mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku, termasuk dalam hal pengelolaan risiko dan penggunaan dana perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari konsekuensi negatif dari pelanggaran aturan dan dapat meningkatkan reputasinya di mata investor dan masyarakat. Komite audit

memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan dalam teori keagenan karena dapat membantu mengurangi konflik keagenan antara manajemen dan pemegang saham, meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan, dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku.

Komite audit adalah salah satu mekanisme yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam mengelola keuangan. Dengan adanya komite audit yang efektif, diharapkan perusahaan mampu mengurangi risiko kecurangan atau kesalahan dalam laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Hal ini dapat mempengaruhi nilai perusahaan secara positif. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini mengasumsikan bahwa keberadaan komite audit akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Samasta *et al.*, 2018) menunjukkan komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

H6 : Diduga Komite Audit berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021.